

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penelitian mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten belu tahun 2016 – 2020, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perkembangan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Belu belum mencapai target yang telah ditetapkan . Dari angka tersebut dapat diketahui bahwa realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah belum mencapai target yang telah ditetapkan dikarenakan pemerintah belum matang dalam melakukan perencanaan program proyek pemerintah, sehingga program dan kegiatan yang direncanakan belum terlaksana dengan baik.
2. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Belu berdasarkan Analisis rasio adalah sebagai berikut :
 - a) Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Belu jika dilihat dari rasio derajat desentralisasi fiskal yang dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Total Pendapatan Daerah. Karena hasil yang didapat dalam penelitian ini dikategorikan sangat kurang, karena masih berada dalam skala interval 00,00-10,00.
 - b) Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Belu jika dilihat dari rasio kemandirian keuangan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah

membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Oleh karena itu, rasio ini tergolong masih sama rendah dan pola hubungannya adalah pola instruktif, karena masih berada dalam interval 0%-25%.

- c) Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Belu jika dilihat dari rasio efektivitas PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah dan (Efisiensi). Sehingga hasil yang didapat dalam penelitian ini dikategorikan sudah efektif karena berada pada interval 90%-100%.
- d) Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Belu jika dilihat dari rasio efisiensi yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja keuangan pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategori efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau dibawah 100 persen. Semakin kecil rasio efisiensi keuangan daerah berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik. Sehingga ini dapat dikategorikan cukup efisien, Karena berada pada interval 80%-90%.
- e) Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Belu dari aspek pertumbuhan dimana menggambarkan seberapa besar kemampuan pemerintahan daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang dicapai dari periode lainnya. Kemampuan pemerintah Kabupaten Belu dalam mengelola keuangan daerah tercermin dalam

anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dimana anggaran pendapatan dan belanja daerah pada pemerintah Kabupaten Belu baik langsung maupun tidak langsung menggambarkan kemampuan pemerintah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan serta pelayanan sosial kemasyarakatan.

- f) Sebagian besar dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah kabupaten belu masih diprioritaskan untuk kebutuhan belanja operasi sehingga belanja modal relatif kecil. Hal ini dapat dilihat dari presentase belanja modal . Besarnya alokasi dana untuk belanja operasi terutama dikarenakan besar besarnya dinas-dinas otonomi dan belanja pegawai untuk gaji PNS.

6.2 Saran

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Belu

- a) Pemerintah Daerah Kabupaten Belu harus memperhatikan beberapa rasio yang nilainya masih dibawah standar sehingga pemerintah dapat mencari solusi dalam upaya menanganinya, seperti pada rasio :

1. Rasio Desentralisasi Fiskal
2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
3. Rasio Keserasian

Sedangkan, rasio yang harus dipertahankan atau ditingkatkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Belu karena memiliki standar diatas rata-rata seperti pada rasio :

1. Rasio Efektivitas PAD

2. Rasio Efisiensi

3. Rasio Pertumbuhan

b) Pemerintah Daerah Kabupataen Belu harus mencari alternative-alternatif yang memungkinkan untuk dapat mengatasi kekurangan pembiayaannya.

2. Bagi Peneliti selanjutnya :

Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menggunakan refrensi ini untuk penelitian selanjutnya, dengan menambah variabel dan juga menggunakan lebih banyak rasio sehingga hasil yang didapat dalam penelitian ini lebih akurat daripada penelitian yang dilakukan sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2007. *Akuntansi sector publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Abdul Halim. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Tiga. Jakarta: Salemba Empat.
- Agung Widhi Kurniawan, Zarah Puspitaningtyas. 2016. *Metode penelitian kuantitatif*. Yogyakarta: Pandiva Buku.
- Awalil Rizky & Nasyith Majidi. 2008. *Neoliberalisme Mencengkeram Indonesia*. Jakarta: E Publishing Company.
- Bustanul Arifin. 2002. *Formasi makro-mikro ekonomi indonesia*. Jakarta: Pustaka INDEF.
- Debby Ch. Rotinsulu, Avriano R. Tenda, Luciana M. Leonufina. 2015. *Analisis dampak anggaran pendapatan dan belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan pengangguran di sulawesi utara*. Jurnal (Manado: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Ekonomi Pembangunan, Universitas Sam Ratulangi).
- Dito Wijaya; Haryadi; Zulgani. 2015. *Analisis tingkat ketergantungan fiskal dan hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi kota jambi*. Jurnal (Jambi: Program Magister Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi).
- Khairul Muluk. 2009. *Peta konsep desentralisasi dan pemerintahan daerah*. Surabaya: Penerbit ITS Press.
- Maria Sonita Bria. 2020. *Analisis efektivitas pengelolaan belanja daerah sektor pendidikan di kabupaten Kupang*. Skripsi (Kupang: Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Katolik Widya Mandira).
- Peraturan Mendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah.
- Reza Monanda Berutu. 2009. *Pengaruh APBD terhadap Pertumbuhan Ekonomi*. Medan: Fakultas Ekonomi, Universitas Sumatera Utara.
- Sugiyono. 2013. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan r & d*, Bandung: Alfabeta.